

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang publik merupakan area terbuka yang secara fundamental menjadi milik seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Konsep ruang publik merujuk pada kawasan atau lahan umum yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjalankan berbagai aktivitas fungsional dan interaktif (Carr, 1992). Selain fungsi utamanya, ruang publik juga menyediakan ruang untuk kegiatan tambahan yang dapat memperkuat ikatan sosial dalam suatu komunitas, baik melalui aktivitas sehari-hari maupun kegiatan yang diselenggarakan secara berkala. Hal ini dapat direalisasikan melalui penyediaan area terbuka bersama yang mencakup berbagai fasilitas seperti lapangan olahraga, poliklinik, tempat ibadah, lembaga pendidikan, pusat perbelanjaan, dan taman.

Masyarakat membutuhkan ruang publik sebagai wadah untuk melaksanakan aktivitas bersama yang memfasilitasi interaksi sosial lintas kelompok (E. Budiharjo & Djoko S., 1999). Melalui ruang publik, tercipta proses pembelajaran berkelanjutan antarindividu dan antarkelompok, yang pada akhirnya menghasilkan pemahaman bersama tentang keberagaman. Masyarakat diajak untuk menyadari bahwa heterogenitas dalam sebuah kota adalah suatu realitas yang harus diterima dan dijalani bersama. Dengan demikian, ruang publik menjadi arena kebebasan bagi warga untuk beraktivitas, baik secara visual maupun fisik, yang memungkinkan terjadinya interaksi dan dialog antarkelompok masyarakat.

Dalam kajian studi kepublikan, istilah "publik" dimaknai secara komprehensif, mencakup spektrum yang luas mulai dari lingkup umum, negara, hingga masyarakat. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa ruang publik secara hakiki terbentuk melalui proses alamiah yang melibatkan interaksi antarindividu dan penggabungan dinamis dari berbagai kelompok sosial, sehingga menciptakan ruang yang inklusif dan beragam.

Oleh karena itu, tanggung jawab negara adalah untuk menyediakan ruang publik di mana warga negara memiliki akses penuh ke semua kegiatan publik, termasuk hak untuk berbicara secara bebas dan mengembangkan wacana publik (A.S. Hikam dalam A.S. Culla, 1999:123). Transformasi ruang publik terjadi melalui kesepakatan resmi dan mekanisme komunikasi massa. Karakteristik ruang publik tidak ditentukan oleh aktivitas atau proses komunikasi itu sendiri, melainkan oleh tingkat aksesibilitasnya. Dengan demikian, perilaku dan pola komunikasi individu dalam ruang publik diarahkan pada interaksi dengan pihak lain, yang ditandai dengan pemanfaatan berbagai jalur akses yang tersedia secara umum. (Brodin, 2006).

Ruang publik memiliki tiga prinsip utama: 1) Kemudahan akses ke informasi. Ruang publik awalnya terbatas pada kaum borjuis. Seiring dengan pesatnya perkembangan media massa, keberadaan *public sphere* kemudian semakin berkembang. Media massa semakin memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk berbicara di forum publik; 2) Tidak ada perlakuan istimewa (*privilege*) terhadap peserta diskusi (partisipan). Tidak adanya *privilege* menunjukkan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara. Tidak ada kelompok yang lebih dominan daripada kelompok lainnya; 3) Setiap orang yang berpartisipasi dalam diskusi menunjukkan alasan logis untuk mencapai konsensus. Alasan rasional sangat penting untuk ruang publik yang baik. Dengan menggunakan rasionalitas dalam debat, orang dapat menghindari perdebatan yang tidak masuk akal (debat kusir) atau konflik emosional antara mereka yang berpartisipasi. (Rouper, Toulouse, 1998 dalam Saleh, 2004).

Perpustakaan merupakan sarana strategis yang disediakan pemerintah untuk mendukung pendidikan dan menyediakan akses informasi yang luas. Menurut definisi resmi dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, perpustakaan didefinisikan sebagai lembaga profesional yang mengelola berbagai koleksi karya tulis, cetak, dan rekam dengan sistem

terstandar, yang bertujuan memenuhi kebutuhan edukasi, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi penggunanya. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 17 Pasal 3 Tahun 2011 menekankan peran penting perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat melalui upaya persuasif untuk mendorong kunjungan.

Secara khusus, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat didirikan dengan misi multifungsi: mendukung pendidikan, mendorong penelitian, melestarikan pengetahuan, menyediakan informasi, dan memberikan sarana rekreasi intelektual. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kecerdasan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, mengembangkan perpustakaan umum berkualitas tinggi menjadi salah satu strategi optimal untuk memperluas akses informasi dan meningkatkan pelayanan publik. Sebagaimana salah satu misi dari DISPUSIPDA adalah, memuaskan masyarakat dan menjadi perpustakaan rujukan bertaraf internasional, baik untuk perpustakaan di Provinsi Jawa Barat maupun perpustakaan lainnya.

“*Public sphere*” atau ruang publik lahir dari karya Jurgen Habermas pada tahun 1989 melalui buku yang berjudul *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Ruang publik pada hakikatnya merupakan area yang terbentuk melalui interaksi sekelompok individu privat—khususnya kalangan borjuis—yang dibangun sedemikian rupa untuk memberikan tanggapan atau perlawanan simbolis terhadap otoritas publik yang ada. *The bourgeois public sphere may conceived above all as the sphere of private people come together as a public; they soon claimed the public sphere regulated from above againts the public authorities themselves, to engage them in a debate over the general rules governing relations in the basically privatized but publicly relevant sphere of commodity exchange and social labor.* (Habermas, 1962/1989:27). Ruang publik yang dimaksud memiliki karakteristik yang membedakannya dari struktur kekuasaan yang berlaku di Eropa pada masa itu. Lebih dari sekadar ruang interaksi, ia mampu berperan sebagai kekuatan

alternatif yang berpotensi menyeimbangkan dan mengajukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh otoritas berkuasa.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengunjung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat, terungkap dinamika kompleks pemanfaatan ruang publik sebagai media interaksi sosial. Salah satu informan, yakni seorang pekerja kantoran bernama Anti (27 tahun), mengungkapkan bahwa pemanfaatan ruang publik DISPUSIPDA memberikan dampak positif terhadap rasa kebersamaan, toleransi, dan kepedulian sosial di lingkungan masyarakat. Ruang ini jadi tempat berkumpulnya berbagai kalangan, sehingga tercipta interaksi yang harmonis.

Senada dengan pernyataan tersebut, Febby (25 tahun), seorang mahasiswa pasca sarjana, mengemukakan bahwa DISPUSIPDA ini seperti ruang netral di mana semua orang bisa datang, belajar, berinteraksi tanpa merasa terintimidasi. Jadi tidak hanya tempat baca, namun juga tempat membangun koneksi sosial. Wawancara dengan Ibu Ika (41 tahun), salah satu staf DISPUSIPDA, semakin memperkuat perspektif bahwa ruang publik membantu meningkatkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di masyarakat kita. Selain itu, dengan adanya berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung. Jadi sebagaimana fungsinya, ruang publik menjadi tempat di mana orang-orang dapat bertemu, berinteraksi, dan membangun hubungan yang lebih baik satu sama lain.

Peneliti sangat tertarik untuk mengkaji permasalahan perpustakaan sebagai media interaksi dari sudut pandang ilmu sosial dikarenakan penelitian ini merupakan sebuah kajian yang sangat signifikan dan mendesak untuk dilaksanakan dalam konteks dinamika sosial dan pengembangan layanan publik kontemporer. Urgensi penelitian ini dilandasi oleh kompleksitas transformasi ruang publik yang kian mempengaruhi pola interaksi sosial masyarakat, khususnya dalam lingkungan institusi pemerintahan yang memiliki peran strategis seperti

DISPUSIPDA. Mengingat peran ruang publik dalam membangun interaksi sosial di masyarakat semakin penting di tengah perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Ruang publik, seperti perpustakaan, tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi, tetapi juga sebagai arena interaksi sosial yang dapat memperkuat hubungan antarindividu dan komunitas (Oldenburg, 1999).

Melalui penelitian ini, Peneliti akan mengidentifikasi secara komprehensif bagaimana ruang publik tidak sekadar dipahami sebagai lokasi fisik semata, melainkan sebagai arena dinamis yang memungkinkan terjadinya komunikasi, pertukaran informasi, dan pembentukan relasi sosial yang bermakna. Kajian mendalam tentang pemanfaatan ruang publik pada DISPUSIPDA akan memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam memahami transformasi sosial, pola interaksi, dan strategi pengembangan layanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer. Penelitian ini tidak hanya akan menghasilkan pemetaan komprehensif tentang dinamika interaksi sosial, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret bagi pengambil kebijakan dalam merancang ruang publik yang lebih inklusif, interaktif, dan bermakna. Penelitian ini memiliki signifikansi yang sangat tinggi dalam memberikan perspektif baru tentang peran strategis ruang publik sebagai medium interaksi sosial yang dinamis dan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, Peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai **“Pemanfaatan Ruang Publik Sebagai Media Interaksi Sosial: Penelitian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemanfaatan ruang publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi interaksi sosial di antara masyarakat?
2. Bagaimana masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat?
3. Apa dampak pemanfaatan ruang publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat terhadap hubungan sosial dan komunitas di sekitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis cara pemanfaatan ruang publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi interaksi sosial di masyarakat.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengevaluasi dampak pemanfaatan ruang publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat terhadap hubungan sosial dan komunitas di sekitar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah
 - a) Bagi Pengembang Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu sosial, khususnya dalam bidang penelitian interaksi sosial dan pemanfaatan ruang publik. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjutan tentang masalah yang sama di tingkat lokal dan nasional.

b) Bagi Peneliti Lain

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran kepada para peneliti atau akademisi lain yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama dan menggunakannya sebagai referensi dalam tulisan mereka.

c) Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi Penulis untuk dapat menggali lebih dalam tentang dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, serta bagaimana ruang publik berperan dalam membangun hubungan antarindividu.

2. Kegunaan Sosial

Fokus manfaat praktis adalah bagaimana temuan penelitian dapat digunakan dalam dunia nyata. Manfaat praktis dari penelitian dapat meliputi pengembangan produk atau proses baru, perbaikan terhadap proses atau prosedur yang sudah ada, serta penyediaan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Secara sosial atau praktis, penelitian ini diharapkan membawa manfaat sebagai berikut:

- a) Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana ruang publik, seperti perpustakaan, dapat difungsikan sebagai tempat interaksi sosial yang lebih efektif. Hal ini dapat berkontribusi pada pengembangan komunitas yang lebih kohesif dan inklusif.
- b) Temuan dari penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik terkait pengelolaan ruang publik. Dengan memahami kebutuhan masyarakat, DISPUSIPDA dapat merancang program yang mendukung interaksi sosial dan partisipasi masyarakat.
- c) Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan layanan di perpustakaan dan ruang publik lainnya. Dengan memanfaatkan ruang secara optimal, pengguna dapat merasakan manfaat lebih dari layanan yang disediakan.

E. Kerangka Berpikir

Pada dasarnya, ruang publik telah ada sejak lama di masyarakat Eropa. Namun, dalam kupasan Habermas ini, ruang publik baru tidak hanya terletak di warung-warung atau salon-salon di Inggris atau Perancis, tetapi juga di ruang baca dan tempat pertemuan khusus yang melibatkan orang-orang dengan komposisi yang jauh lebih berbeda, dengan debat yang tidak berhenti pada debat kusir, dan dengan orientasi topik yang berbeda. Meskipun banyak akademisi mengkritik pengaruh borjuis di ruang publik pada abad tersebut, Habermas menciptakan apa yang dia sebut sebagai "*institutional criteria*" (Habermas, 1962/1989:36). karakter yang dapat membantu kita memahami maksud Habermas tentang ruang publik.

Kriteria pertama adalah menghindari pembicaraan kritis tentang status atau mengabaikan status (*disregard of status*). Ruang publik tidak membahas keinginan untuk memiliki status yang sama dengan mereka yang berkuasa. Sebaliknya, membahas adanya kesempatan yang sama untuk mengungkapkan dan mengkritik realitas. Bukan pula upaya untuk membuat semua orang sama di kafe, salon, atau di komunitas. Ruang publik lebih menekankan adanya konsep yang terlembagakan dan klaim yang dapat diterima secara objektif sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum; bahkan jika konsep tersebut tidak terwujud, ide-ide tersebut masih ada di benak masyarakat secara sadar.

Kriteria kedua adalah fokus pada *domain of common concern*. Karena fakta bahwa beberapa wilayah dalam sejarah hanya dapat ditafsirkan oleh orang-orang yang berkuasa dan atau kelompok gereja. Padahal domain tersebut bisa dibincangkan dan melibatkan publik secara lebih luas. Karya-karya tersebut bukan lagi berada dalam kebutuhan untuk bisa diakses, melainkan sudah menjadi komoditas yang diperdagangkan oleh industri. Karya-karya itulah yang menjadi subjek percakapan kritis di ruang publik. Ada banyak interpretasi yang berbeda dan dapat berasal dari siapa saja yang berada di ruang publik tersebut.

Kriteria terakhir adalah inklusif (*inclusivity*). Meskipun terkadang ia eksklusif dari publik, ia menjadi bagian dari kelompok kecil tersebut di ruang publik. Ide-ide yang muncul dalam perdebatan khusus mereka pada dasarnya tidak hanya milik anggota ruang publik; mereka juga dapat mengaksesnya jika disebarkan melalui media publik. Karena semua orang memiliki akses ke sumber-sumber yang terkait, masalah yang diangkat sebagai bahan diskusi menjadi lebih umum.

Pada dasarnya, setiap orang di ruang publik merasa seperti juru bicara atau bahkan guru dari apa yang disebut sebagai publik itu sendiri, yang menurut Habermas adalah perwakilan atau representasi baru dari borjuis. *The fully developed bourgeois public sphere was based on fictitious identity of the two roles assumed by the privatized individuals who came together to form a public: the role of property owners and the role of human beings pure and simple* (Habermas, 1962/1989:56). Konsep ruang publik menurut Habermas pada dasarnya dirancang untuk menghasilkan solusi politis melalui pendekatan diskursif yang mengutamakan moralitas dan rasionalitas. Meskipun awalnya fokus pada konteks masyarakat borjuis, gagasan ini memberikan landasan konseptual yang memungkinkan pemahaman lebih luas tentang ruang publik sebagai arena partisipatif di mana masyarakat dapat terlibat secara kritis dalam mengupas permasalahan kontemporer.

Habermas menggambarkan ruang publik sebagai ruang yang bebas dari penindasan di mana setiap orang ditempatkan dengan cara yang sama atau egaliter. Mereka dapat berbicara tentang berbagai hal, bahkan yang tidak penting, dan ini mirip dengan definisi politik, yang berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *politeia*, yang merujuk pada istilah *polis*. *Polis* adalah negara kota di mana orang bebas berbicara, bahkan tentang masalah subversif. Berarti sesuai sebagaimana fungsi dan peran perpustakaan sebagai ruang publik. Yang dikuatkan pada Undang-Undang No 43 tentang Perpustakaan.

Lebih lanjut, Jurgen Habermas mengatakan bahwa ruang publik adalah media untuk mengkomunikasikan informasi. Pandangan ini relevan dengan bagaimana perpustakaan berfungsi sebagai media komunikasi antara pengarang dan pembaca yang ingin mendapatkan informasi melalui buku atau karya mereka, atau antara pembaca dan penulis dalam diskusi tentang buku yang baru diterbitkan. Dengan kata lain, Habermas menggambarkan perpustakaan sebagai salah satu cara untuk berkomunikasi tentang ruang publik. Perpustakaan umum, yang didukung oleh beberapa undang-undang pemerintah dan UNESCO, merupakan salah satu cara terbaik untuk membantu orang belajar sepanjang hidup. Mereka juga menjadi agen kebudayaan dan menawarkan akses cepat dan mudah ke informasi (Laksmi, 2011).

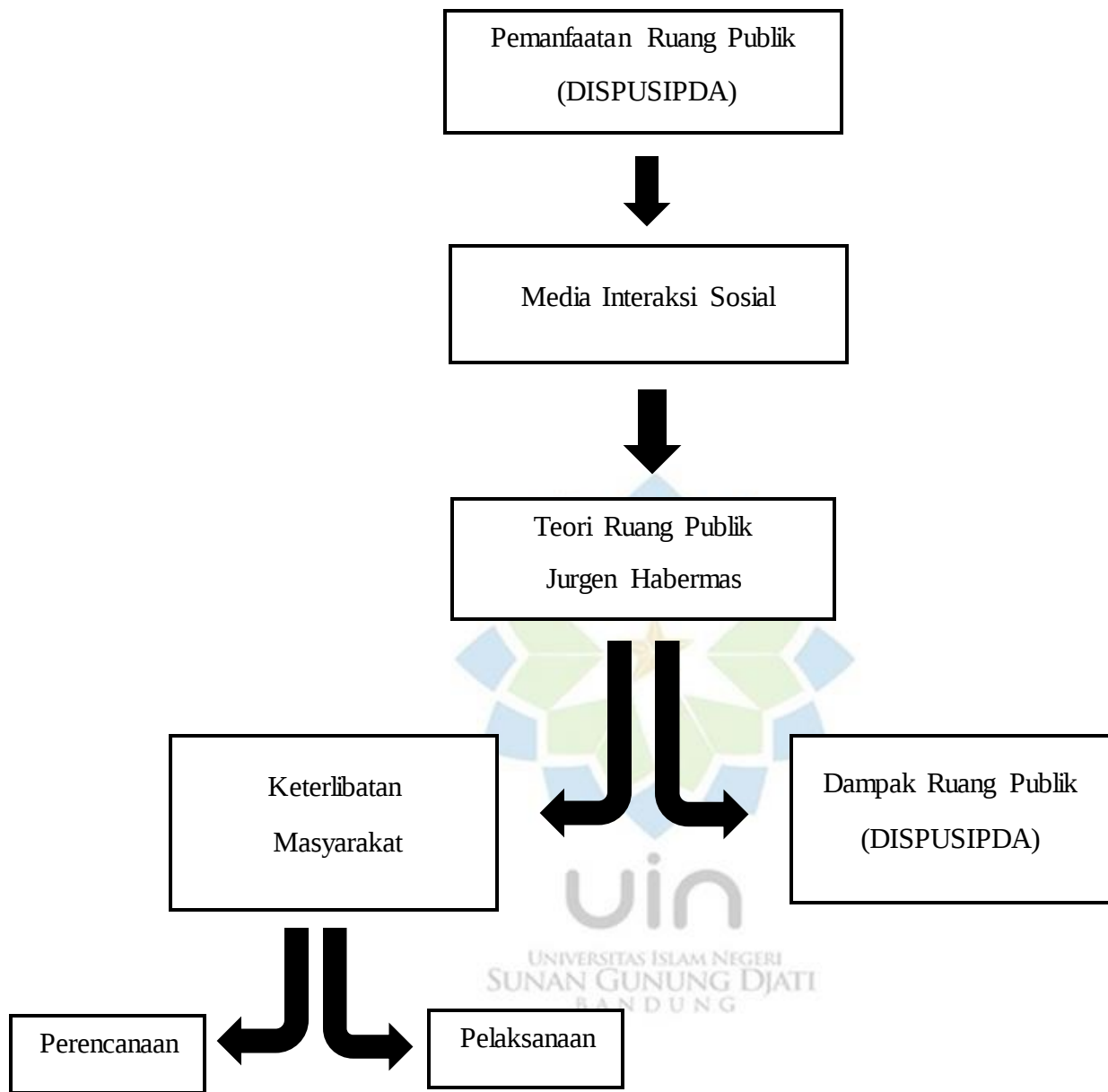
Ini menunjukkan kesamaan antara konsep perpustakaan dan ruang publik, di mana perpustakaan berfungsi sebagai alat perjuangan melawan kebodohan dan ketertinggalan pengetahuan. Dalam panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Umum (1992), tujuan perpustakaan umum dijelaskan dalam tiga kategori: tujuan umum, tujuan fungsional, dan tujuan operasional. Salah satu poin penting dari ketiga tujuan tersebut adalah mengembangkan kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah, bertanggung jawab, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Ini menegaskan bahwa perpustakaan umum berperan sebagai ruang demokratis yang memungkinkan masyarakat berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Dalam konteks DISPUSIPDA, ruang publik yang terdiri dari perpustakaan dan area kearsipan berperan sebagai tempat di mana masyarakat dapat berinteraksi, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemanfaatan ruang publik di DISPUSIPDA dapat memfasilitasi interaksi sosial di antara individu dan kelompok. Pertama, penelitian ini akan mengidentifikasi pemanfaatan ruang publik di DISPUSIPDA dalam memfasilitasi interaksi sosial di antara masyarakat. Menurut Habermas,

aksesibilitas dan kualitas fasilitas sangat penting dalam menciptakan ruang publik yang inklusif dan partisipatif (Habermas, 1989). Selanjutnya, penelitian akan mengidentifikasi bentuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan DISPUSIPDA serta mengevaluasi dampak pemanfaatan DISUPUSIPDA terhadap hubungan sosial dan komunitas di sekitar.

Selain itu, kerangka berpikir ini juga akan meneliti peran ruang publik dalam membangun komunitas. Ruang publik yang efektif dapat memperkuat ikatan sosial dan membangun identitas komunitas, di mana masyarakat merasa memiliki ruang tersebut dan terlibat aktif di dalamnya. Akhirnya, berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi akan diberikan untuk pengembangan DISPUSIPDA, termasuk usulan program atau kegiatan yang dapat meningkatkan interaksi sosial dan partisipasi masyarakat.





Gambar 1.1

Kerangka Berpikir

Sumber: (Olahan Penulis, 2025)